

**DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
(R K P D)
KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)
TAHUN ANGGARAN 2022**



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang bersifat teknis operasional dan merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan serta mengakomodir aspirasi, usulan masyarakat, kalangan dunia usaha, serta jajaran Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

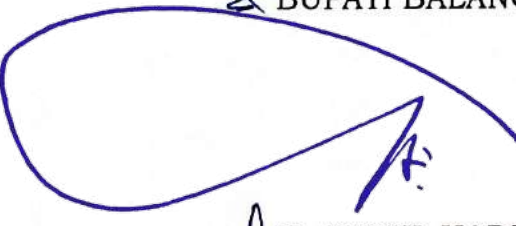
Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022

BUPATI BALANGAN, ✓


H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 6 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 65

BAGIAN HUKUM SETDA
R.



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat		100 %	142.835.700	APBD
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol yang aktif		100 %	2.007.124.250	APBD
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase Ormas yang aktif		100 %	286.405.750	APBD
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif		100 %	116.956.600	APBD
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti		100 %	688.190.800	APBD
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				25.322.607.607	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				17.691.405.407	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				17.691.405.407	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)		76,49 %	10.727.170.307	APBD
		Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik		100 %		
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial		81 %	411.658.000	APBD
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase cakupan PPKS (lansia,Disabilitas,Anak Terlantar ,Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial		100 %	484.792.000	APBD
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial		69 %	5.680.450.600	APBD



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100 %	360.235.500	APBD
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase makam yang terawat		100 %	27.099.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				703.504.300	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				1.146.286.000	APBD
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten		21,05	648.434.000	APBD
		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)		73,02		
		IPG (Indeks Pembangunan gender)		92,77		
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif		100	50.406.000	APBD
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun		16,56	135.589.800	APBD
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak		100	74.672.200	APBD
	Program Pemenuhan Hak Anak	IPA (Indeks Perlindungan Anak		68,25	140.389.000	APBD
	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif		100	96.795.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				6.984.003.600	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa				6.484.916.200	APBD
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan		1 Kerjasama	2.239.563.600	APBD



No	Urusan/ Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2023 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu		85 %	4.444.440.000	APBD
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang		55 %	300.000.000	APBD
8	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi				12.636.745.047	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				8.701.823.047	APBD
	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal				8.701.823.047	APBD
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik		Nilai Persen	8.251.525.047	APBD
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota		100 %	82.438.000	APBD
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi		Rupiah	58.576.000	APBD
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP		%	112.816.000	APBD
		Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP		%		
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		%	78.403.000	APBD
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal		100 %	118.065.000	APBD
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				3.671.461.000	APBD